



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2567 TAHUN 2025
TENTANG
DAERAH DENGAN KEDARURATAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan, Menteri menetapkan lokasi yang memenuhi kondisi Kedaruratan Sampah yang memerlukan penanganan segera;
- b. bahwa kondisi Kedaruratan Sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan rincian kriteria yang berkaitan dengan unsur mekanisme pengelolaan sampah yang tidak berjalan secara memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Daerah Dengan Kedaruratan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
4. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1080 Tahun 2024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG DAERAH DENGAN KEDARURATAN SAMPAH.

KESATU : Kedaruratan Sampah merupakan terjadinya timbunan dan timbunan sampah dalam jumlah besar akibat mekanisme pengelolaan sampah yang tidak berjalan secara memadai, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat.

KEDUA : Kedaruratan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada lokasi yang berada dalam daerah yang memenuhi kriteria:

1. tidak memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA);
2. tidak melaksanakan pengelolaan sampah sesuai peraturan perundang-undangan dan masih melakukan kegiatan *open dumping*;
3. nilai kinerja pengelolaan sampah melalui Adipura ≤ 60 (kurang dari atau sama dengan enam puluh); dan/atau
4. sedang dikenakan sanksi administratif terkait pengelolaan sampah.

- KETIGA : Daerah yang memenuhi kriteria kedaruratan sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KERJA SAMA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



TURYAWAN ARDI

HANIF FAISOL NUROFIQ

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
6. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/CEO Daya Anagata Nusantara (Danantara).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2567 TAHUN 2025
TENTANG
DAERAH DENGAN KEDARURATAN SAMPAH

DAFTAR DAERAH DENGAN KEDARURATAN SAMPAH

1. Kabupaten Aceh Tamiang
2. Kabupaten Langkat
3. Kabupaten Rokan Hilir
4. Kabupaten Siak
5. Kabupaten Ogan Komering Ilir
6. Kabupaten Pringsewu
7. Kabupaten Pasuruan
8. Kabupaten Bojonegoro
9. Kota Madiun
10. Kabupaten Lebak
11. Kabupaten Lombok Barat
12. Kabupaten Lombok Tengah
13. Kabupaten Sumbawa
14. Kabupaten Bima
15. Kabupaten Lembata
16. Kabupaten Manggarai Timur
17. Kabupaten Sambas
18. Kabupaten Tana Tidung
19. Kabupaten Bolaang Mongondow
20. Kabupaten Kepulauan Sangihe
21. Kabupaten Minahasa Utara
22. Kabupaten Minahasa Tenggara
23. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
24. Kota Tomohon
25. Kabupaten Poso
26. Kabupaten Bone
27. Kabupaten Maros
28. Kabupaten Soppeng
29. Kabupaten Wajo
30. Kabupaten Sidenreng Rappang
31. Kabupaten Pinrang
32. Kabupaten Enrekang
33. Kabupaten Toraja Utara
34. Kabupaten Kolaka
35. Kabupaten Konawe Selatan
36. Kabupaten Bombana
37. Kabupaten Kolaka Utara

38. Kabupaten Kolaka Timur
39. Kabupaten Buru
40. Kabupaten Aceh Selatan
41. Kabupaten Aceh Tenggara
42. Kabupaten Aceh Timur
43. Kabupaten Aceh Tengah
44. Kabupaten Aceh Besar
45. Kabupaten Pidie
46. Kabupaten Aceh Utara
47. Kabupaten Simeulue
48. Kabupaten Aceh Singkil
49. Kabupaten Bireuen
50. Kabupaten Aceh Barat Daya
51. Kabupaten Gayo Lues
52. Kabupaten Aceh Jaya
53. Kabupaten Bener Meriah
54. Kabupaten Pidie Jaya
55. Kota Banda Aceh
56. Kota Lhokseumawe
57. Kota Subulussalam
58. Kota Medan
59. Kabupaten Tapanuli Tengah
60. Kabupaten Tapanuli Utara
61. Kabupaten Tapanuli Selatan
62. Kabupaten Nias
63. Kabupaten Karo
64. Kabupaten Simalungun
65. Kabupaten Asahan
66. Kabupaten Labuhan Batu
67. Kabupaten Toba Samosir
68. Kabupaten Mandailing Natal
69. Kabupaten Nias Selatan
70. Kabupaten Pakpak Bharat
71. Kabupaten Serdang Bedagai
72. Kabupaten Batu Bara
73. Kabupaten Padang Lawas Utara
74. Kabupaten Padang Lawas
75. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
76. Kabupaten Labuhan Batu Utara
77. Kabupaten Nias Utara
78. Kabupaten Nias Barat
79. Kota Pematang Siantar
80. Kota Sibolga
81. Kota Tanjung Balai
82. Kota Binjai
83. Kota Tebing Tinggi
84. Kota Padangsidempuan

85. Kota Gunungsitoli
86. Kabupaten Sijunjung
87. Kabupaten Padang Pariaman
88. Kabupaten Lima Puluh Kota
89. Kabupaten Pasaman
90. Kabupaten Kepulauan Mentawai
91. Kabupaten Dharmasraya
92. Kabupaten Solok Selatan
93. Kabupaten Pasaman Barat
94. Kota Bukittinggi
95. Kota Payakumbuh
96. Kota Pariaman
97. Kabupaten Indragiri Hulu
98. Kabupaten Indragiri Hilir
99. Kabupaten Rokan Hulu
100. Kota Pekanbaru
101. Kota Dumai
102. Kabupaten Merangin
103. Kabupaten Muaro Jambi
104. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
105. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
106. Kota Sungai Penuh
107. Kabupaten Ogan Komering Ulu
108. Kabupaten Musi Rawas
109. Kabupaten Ogan Ilir
110. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
111. Kabupaten Musi Rawas Utara
112. Kota Palembang
113. Kota Prabumulih
114. Kabupaten Kaur
115. Kabupaten Seluma
116. Kabupaten Mukomuko
117. Kabupaten Lebong
118. Kabupaten Kepahiang
119. Kabupaten Lampung Tengah
120. Kabupaten Lampung Utara
121. Kabupaten Pesawaran
122. Kabupaten Mesuji
123. Kabupaten Tulang Bawang Barat
124. Kabupaten Pesisir Barat
125. Kota Bandar Lampung
126. Kabupaten Bangka
127. Kabupaten Belitung
128. Kabupaten Bangka Tengah
129. Kabupaten Bangka Barat
130. Kota Pangkal Pinang
131. Kabupaten Karimun

132. Kabupaten Natuna
133. Kabupaten Kepulauan Anambas
134. Kota Batam
135. Kabupaten Kepulauan Seribu
136. Kota Jakarta Pusat
137. Kota Jakarta Utara
138. Kota Jakarta Barat
139. Kota Jakarta Selatan
140. Kota Jakarta Timur
141. Kabupaten Bogor
142. Kabupaten Sukabumi
143. Kabupaten Cianjur
144. Kabupaten Bandung
145. Kabupaten Garut
146. Kabupaten Tasikmalaya
147. Kabupaten Cirebon
148. Kabupaten Majalengka
149. Kabupaten Sumedang
150. Kabupaten Indramayu
151. Kabupaten Subang
152. Kabupaten Purwakarta
153. Kabupaten Karawang
154. Kabupaten Bekasi
155. Kabupaten Bandung Barat
156. Kabupaten Pangandaran
157. Kota Sukabumi
158. Kota Bandung
159. Kota Cirebon
160. Kota Bekasi
161. Kota Depok
162. Kota Cimahi
163. Kota Tasikmalaya
164. Kabupaten Purbalingga
165. Kabupaten Banjarnegara
166. Kabupaten Karanganyar
167. Kabupaten Rembang
168. Kabupaten Demak
169. Kabupaten Semarang
170. Kabupaten Kendal
171. Kabupaten Batang
172. Kabupaten Pekalongan
173. Kabupaten Pemalang
174. Kabupaten Tegal
175. Kabupaten Brebes
176. Kota Semarang
177. Kota Pekalongan
178. Kota Tegal

179. Kota Yogyakarta
180. Kabupaten Bantul
181. Kabupaten Sleman
182. Kabupaten Ponorogo
183. Kabupaten Blitar
184. Kabupaten Bondowoso
185. Kabupaten Bangkalan
186. Kota Batu
187. Kabupaten Pandeglang
188. Kabupaten Tangerang
189. Kabupaten Serang
190. Kota Tangerang
191. Kota Cilegon
192. Kota Tangerang Selatan
193. Kabupaten Tabanan
194. Kabupaten Badung
195. Kabupaten Klungkung
196. Kabupaten Karangasem
197. Kabupaten Gianyar
198. Kota Denpasar
199. Kabupaten Dompu
200. Kabupaten Sumbawa Barat
201. Kabupaten Lombok Utara
202. Kota Bima
203. Kabupaten Kupang
204. Kabupaten Timor Tengah Selatan
205. Kabupaten Timor Tengah Utara
206. Kabupaten Belu
207. Kabupaten Alor
208. Kabupaten Flores Timur
209. Kabupaten Sikka
210. Kabupaten Ende
211. Kabupaten Manggarai
212. Kabupaten Sumba Timur
213. Kabupaten Sumba Barat
214. Kabupaten Rote Ndao
215. Kabupaten Nagekeo
216. Kabupaten Sumba Tengah
217. Kabupaten Sabu Raijua
218. Kabupaten Malaka
219. Kota Kupang
220. Kabupaten Mempawah
221. Kabupaten Sanggau
222. Kabupaten Ketapang
223. Kabupaten Sintang
224. Kabupaten Kapuas Hulu
225. Kabupaten Bengkayang

226. Kabupaten Landak
227. Kabupaten Sekadau
228. Kabupaten Melawi
229. Kabupaten Kayong Utara
230. Kabupaten Kubu Raya
231. Kota Pontianak
232. Kota Singkawang
233. Kabupaten Kotawaringin Timur
234. Kabupaten Barito Selatan
235. Kabupaten Katingan
236. Kabupaten Seruyan
237. Kabupaten Lamandau
238. Kabupaten Gunung Mas
239. Kabupaten Pulang Pisau
240. Kabupaten Barito Timur
241. Kabupaten Banjar
242. Kabupaten Tapin
243. Kota Banjarmasin
244. Kabupaten Kutai Kartanegara
245. Kabupaten Berau
246. Kabupaten Kutai Barat
247. Kabupaten Kutai Timur
248. Kabupaten Mahakam Hulu
249. Kota Samarinda
250. Kabupaten Malinau
251. Kabupaten Minahasa
252. Kabupaten Kepulauan Talaud
253. Kabupaten Minahasa Selatan
254. Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
255. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
256. Kota Manado
257. Kota Bitung
258. Kabupaten Banggai
259. Kabupaten Toli-toli
260. Kabupaten Buol
261. Kabupaten Banggai Kepulauan
262. Kabupaten Banggai Laut
263. Kabupaten Morowali Utara
264. Kabupaten Kepulauan Selayar
265. Kabupaten Jeneponto
266. Kabupaten Takalar
267. Kabupaten Gowa
268. Kabupaten Luwu
269. Kabupaten Tana Toraja
270. Kabupaten Luwu Utara
271. Kabupaten Konawe
272. Kabupaten Muna

273. Kabupaten Buton
274. Kabupaten Wakatobi
275. Kabupaten Buton Utara
276. Kabupaten Konawe Kepulauan
277. Kabupaten Muna Barat
278. Kabupaten Buton Tengah
279. Kabupaten Buton Selatan
280. Kabupaten Boalemo
281. Kabupaten Gorontalo Utara
282. Kabupaten Pasangkayu
283. Kabupaten Mamuju
284. Kabupaten Mamasa
285. Kabupaten Polewali Mandar
286. Kabupaten Majene
287. Kabupaten Mamuju Tengah
288. Kabupaten Maluku Tengah
289. Kabupaten Maluku Tenggara
290. Kabupaten Tanimbar
291. Kabupaten Seram Bagian Timur
292. Kabupaten Seram Bagian Barat
293. Kabupaten Kepulauan Aru
294. Kabupaten Maluku Barat Daya
295. Kabupaten Buru Selatan
296. Kota Ambon
297. Kota Tual
298. Kabupaten Halmahera Barat
299. Kabupaten Halmahera Tengah
300. Kabupaten Halmahera Utara
301. Kabupaten Halmahera Selatan
302. Kabupaten Kepulauan Sula
303. Kabupaten Halmahera Timur
304. Kabupaten Kepulauan Yapen
305. Kabupaten Biak Numfor
306. Kabupaten Keerom
307. Kabupaten Waropen
308. Kabupaten Mamberamo Raya
309. Kabupaten Fakfak
310. Kabupaten Teluk Bintuni
311. Kabupaten Teluk Wondama
312. Kabupaten Manokwari Selatan
313. Kabupaten Pegunungan Arfak
314. Kabupaten Sorong
315. Kabupaten Raja Ampat
316. Kabupaten Tambrau
317. Kabupaten Maybrat
318. Kabupaten Merauke
319. Kabupaten Boven Digoel

- 320. Kabupaten Mappi
- 321. Kabupaten Asmat
- 322. Kabupaten Nabire
- 323. Kabupaten Puncak Jaya
- 324. Kabupaten Paniai
- 325. Kabupaten Mimika
- 326. Kabupaten Puncak
- 327. Kabupaten Dogiyai
- 328. Kabupaten Intan Jaya
- 329. Kabupaten Deiyai
- 330. Kabupaten Jayawijaya
- 331. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 332. Kabupaten Yahukimo
- 333. Kabupaten Mamberamo Tengah
- 334. Kabupaten Yalimo
- 335. Kabupaten Lanny Jaya
- 336. Kabupaten Nduga

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KERJA SAMA,



TURYAWAN ARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ